

KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU DALAM MENCEGAH BANJIR PADA TAHUN 2022

Oleh : Ahlunazaril Hampratama

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/ Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Floods in Pekanbaru City have become a "regular" disaster that often occurs throughout the year. In 2022, Pekanbaru City will be recorded as having 363 flood problem points spread throughout the Pekanbaru City area. This is of course still a major problem that the Pekanbaru City government has not been able to resolve. In this research, to conduct an analysis of the Pekanbaru City government regarding its handling of flooding, Performance Theory was used to assess the extent to which the Pekanbaru City government has worked to prevent flooding. The research method used is a qualitative method by explaining descriptively. The type of research data used is primary data in the form of data obtained from research informants as well as secondary data obtained from related documents that can support data for research. The research location was carried out at the Pekanbaru City Public Works and Spatial Planning Department.

The results of the research show that the performance of the Pekanbaru City Public Works and Spatial Planning Department in the productivity aspect can be said to be good by showing positive results. In terms of service quality, it is in accordance with what the community needs and wants. In the aspect of responsiveness, responsiveness to community reports/complaints related to flooding, responsiveness to complaints about the IPAL project, and responsiveness in fulfilling community aspirations and hopes are still not good. In the aspect of responsibility, there are still problems with drainage which is experiencing problems but is slow to make improvements and there are still many drainages that are not connected between one area and another. In the aspect of accountability, the relevant public officials have done well, but accountability to the community is still lacking so that the public still feels that the Public Works and Spatial Planning Department has not been optimal in carrying out its duties.

Keywords: *Performance, Floods, Pekanbaru City PUPR Department*

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru memiliki iklim tropis. Secara geografis Kota Pekanbaru terletak pada koordinat $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, pada tahun 2021 suhu udara maksimum Kota Pekanbaru berada diangka $35,6^{\circ}\text{C}$ yang terjadi pada bulan Oktober 2021. Sementara udara minimum berada diangka 21°C yang terjadi pada bulan Juni dan Juli 2021. Untuk curah hujan, Kota Pekanbaru memiliki curah hujan maksimum mencapai $409,90 \text{ mm}^3$ yang terjadi dibulan April 2021 dengan jumlah hari hujan selama 20 hari.

Sedangkan curah hujan minimum berada diangka $91,30 \text{ mm}^3$ yang terjadi di bulan Juli 2021 selama 8 hari (BPS Kota Pekanbaru, 2022). Letak Kota Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Siak yang membelah kota menjadi dua wilayah. Sungai Siak yang memiliki panjang 370 KM ini merupakan sungai terdalam di Indonesia yang dulunya memiliki kedalaman hingga 30 meter. Namun, karena pendangkalan sekarang kedalaman sungai ini hanya berkisar 18 meter (Kumparan.com, 2022). Dengan kondisi Sungai Siak yang mengalami pendangkalan ini menyebabkan air sungai menjadi mudah meluap disaat terjadi hujan.

Salah satu bencana yang sering terjadi di Kota Pekanbaru ialah banjir. Menurut Hewlett dalam Chay Asdak menyebutkan banjir merupakan aliran atau genangan air yang menimbulkan kerugian dalam hal ekonomi ataupun yang menyebabkan korban jiwa (Asdak, 1995). Menurut Yohana, dkk.

menyebutkan banjir merupakan suatu peristiwa yang terjadi akibat terjadinya penumpukan air yang jatuh dan tidak dapat ditampung oleh tanah (Yohana, Griandini, & Muzambeq, 2017). Kemudian menurut Suripin menjelaskan banjir adalah suatu peristiwa meluapnya air dari batas tebing sungai dalam jangka waktu relatif pendek atau suatu peristiwa menggenangnya air di permukaan tanah sampai melebihi batas waktu tertentu yang mengakibatkan kerugian (Suripin, 2004). Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan banjir adalah suatu fenomena alam yang terjadi akibat dari terbentuknya genangan air yang tidak tertampung oleh tanah.

Pada tahun 2020 Kota Pekanbaru sempat mengalami penurunan jumlah titik di tahun 2020 dengan 13 kelurahan yang memiliki titik banjir dari tahun sebelumnya yang dimana sebanyak. Namun kembali mengalami peningkatan ditahun 2021 dengan bertambah 4 titik banjir sehingga ditotal menjadi 17 kelurahan yang memiliki titik banjir dengan total 121 titik banjir. Salah satu titik yang mengalami banjir ada di sekitar aliran Sungai Sail pada akhir 2022 lalu.

Gambar 1.1

Banjir akibat luapan air sungai di Jalan Lembah Raya



Sumber : RiauKini.com, 2022

Banjir ini disebabkan oleh meluapnya air sungai sehingga menyebabkan banjir. Dampak banjir dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Selain itu, dampak banjir yang terjadi di daerah perkotaan berbeda dengan daerah pedesaan. Banjir yang terjadi biasanya akan merendam kawasan pemukiman warga, kadang kala juga menimbulkan kerusakan pada rumah warga. Selain itu, arus transportasi juga bisa terhambat atau bahkan lumpuh total karena genangan banjir.

Selain itu juga, masih dapat ditemukan saluran drainase di Kota Pekanbaru yang belum terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Saluran drainase yang seharusnya terhubung antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya akan membuat aliran drainase menjadi baik sehingga air ini dapat mengalir ke tempat yang

seharusnya. Karena masih banyak saluran drainase yang tidak terhubung mengakibatkan drainase ini menjadi drainase mati. Akibatnya disaat hujan mengguyur Kota Pekanbaru air hujan ini tidak tertampung dengan baik karena saluran drainase yang ada tidak terhubung dan menimbulkan banjir di wilayah tersebut. Namun sayangnya dalam beberapa tahun ke belakang tidak ada kegiatan ataupun program yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk mengintegrasikan saluran drainase yang tidak terhubung ini. Padahal mengintegrasikan seluruh saluran drainase yang ada di Kota Pekanbaru sehingga saling terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya akan dapat mencegah banjir untuk terjadi.

Tabel 1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru 2018-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				I	II	III	IV	V
1.	Menyediakan Infrastruktur yang baik	1. Meningkatkan kualitas Infrastruktur kota.	Rasio Panjang Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik.	50%	52%	54%	56%	58%
			Cakupan akses Air Bersih	7%	11%	14%	17%	19%
			Cakupan Pelayanan Air Limbah	0	0	0	0	5.500 SR
			Persentase Titik Banjir Terselesaikan	25%	30%	35%	40%	45%

Sumber : Rencana Strategis Dinas PUPR Kota Pekanbaru 2018-2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam rentan waktu 5 tahun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru telah memiliki rancangan terkait bagaimana pembangunan dan program kerja yang akan dilakukan, termasuk dalam pengendalian banjir yang masih sering terjadi di Kota Pekanbaru. Dalam kurun 5 tahun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru telah menetapkan persentase titik banjir yang harus dicapai setiap tahunnya. Di tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menargetkan titik banjir di Kota Pekanbaru dapat terselesaikan sebanyak 45% dari jumlah titik banjir yang ada.

Gambar 1.2

Peta Wilayah Rawan Banjir



Sumber : Peta Wilayah Banjir di Provinsi Riau (2021)

Banjir di Kota Pekanbaru sudah menjadi bencana “langganan” yang rutin terjadi di setiap tahunnya. Di saat musim hujan, kita dapat dengan mudah menemukan genangan air yang membanjiri jalan maupun pemukiman masyarakat. Dikutip dari Pekanbaru.go.id, menurut Penjabat (PJ) Walikota Pekanbaru Muflihun, banjir saat ini bukan disebabkan oleh penyumbatan drainase, tetapi rata-rata disebabkan oleh luapan sungai (Pekanbaru.go.id, 2022). Namun salah satu titik

langganan banjir di Kota Pekanbaru ialah Jalan H. R. Soebrantas dan Jalan Arifin Ahmad. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Penjabat (PJ) Walikota Pekanbaru, karena kedua ruas jalan tersebut tidak berada di dekat sungai.

Kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil merupakan hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja. Kinerja yang menjadi penilaian dari suatu instansi pemerintahan dalam hal pelaksanaan tugas dan kewenangannya harus berkesesuaian dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, suatu instansi pemerintahan haruslah memiliki tujuan yang akan dicapai dan tujuan ini harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan atau apa yang menjadi keluhan masyarakat. Sehingga apa yang dikerjakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang penting sebuah instansi pemerintahan harus dinilai bagaimana kinerjanya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sehingga bisa dilihat apa yang sudah dicapai, apa yang menjadi kendala, apa yang masih harus diperbaiki agar kedepannya dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan.

Kota Pekanbaru yang menjadi pusat pemerintahan dan bisnis di

Provinsi Riau haruslah menjadi wilayah yang aman, termasuk dalam hal kebencanaan. Pemerintah punya kewajiban untuk memastikan wilayah dan masyarakatnya aman, termasuk di dalam situasi bencana. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun dan merancang peraturan-peraturan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pencegahan. Dengan demikian, pencegahan maupun penanganan di daerah bisa dilakukan dengan maksimal sehingga dapat meminimalisir dampak buruk yang dapat disebabkan oleh suatu bencana.

Maka dari itu, berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul “**Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam Mencegah Banjir Pada Tahun 2022**”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa permasalahan banjir masih menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh Kota Pekanbaru. Maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah untuk diangkat ialah :

“Bagaimana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam upaya mencegah banjir di Kota Pekanbaru pada tahun 2022?”

KERANGKA TEORITIS

a. Kinerja

Kinerja bisa diartikan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil. Kinerja memiliki makna yang lebih luas

yang bukan hanya hasil kerja akan tetapi juga termasuk di dalamnya proses dan usaha yang dilakukan. Menurut Keban (2008) kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian hasil yang dapat dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu) atau kelompok (kinerja kelompok) atau institusi (kinerja organisasi) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan).

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006) menjelaskan bagaimana kinerja instansi pemerintahan berdasarkan indikator yang mengacu pada prinsip-prinsip *Good Governance*. Indikator yang dimaksud ialah :

1) Produktivitas

Konsep produktivitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas dari pelayanan yang diberikan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office (GAO)* mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

2) Kualitas Layanan

Kualitas layanan menjadi indikator yang digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penilaian penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Namun belakangan ini banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai pelayanan yang diberikan organisasi publik dalam hal ini pemerintah yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima.

3) Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Singkatnya, responsivitas disini merujuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan kebutuhan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan pemegang kekuasaan dalam menjalankan misi dan

tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan adanya ketidakselarasan antara pelayanan yang dengan kebutuhan masyarakat yang diminta. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

4) Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5) Akuntabilitas

Dalam penilaian kinerja, konsep dasar akuntabilitas dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan yang dilakukan organisasi publik itu konsisten dan selaras dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti

pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja seseorang atau suatu lembaga. Faktor tersebut dapat diketahui dari bagaimana partisipasi seseorang tersebut dalam menyelesaikan suatu tugas yang diberikan. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, serta menjaga kedisiplinan dengan tidak pergi keluar kantor saat jam kerja sedang berlangsung.

b. Pencegahan

Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga (Marpaung, 2001).

Upaya preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin "*pravenire*" yang artinya "datang sebelum /antisipasi / mencegah untuk tidak terjadi sesuatu". Dalam pengertian yang lebih luas, tindakan preventif diartikan sebagai upaya yang secara sengaja

dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menjelaskan data yang dikumpulkan dan disajikan secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi (pengamatan), *interview* (wawancara) dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari informan dan berbagai macam dokumen yang berkaitan dengan penjelasan terkait kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer yang berupa data – data yang diperoleh dari informan penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen – dokumen terkait yang dapat mendukung data untuk penelitian terkait kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru pada tahun 2022. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Banjir Tahun 2022

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana banjir di Kota Pekanbaru, pemerintah kota telah menetapkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Dinas ini memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam hal penyelenggaraan program yang berkaitan dengan pencegahan banjir di Kota Pekanbaru. Namun dengan masih terjadinya dan bertambahnya jumlah titik banjir di Kota Pekanbaru menjadi pertanda bahwa kinerja pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru masih dapat dikatakan tidak maksimal.

Pencegahan atau preventif merupakan sebuah pendekatan, prosedur dan metode yang sengaja dibuat dan dilakukan oleh individu ataupun lembaga dalam mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian yang tidak diinginkan. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Kinerja yang dikemukakan oleh Agus

Dwiyanto dalam bukunya yang berjudul *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Dalam teori ini disebutkan bahwa kinerja instansi pemerintahan dapat dilihat dengan mengacu pada indikator yang berdasarkan prinsip *Good Governance*. Adapun Indikator yang dimaksud ialah :

1. Produktivitas

Konsep produktivitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas dari pelayanan yang diberikan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tahun 2018-2022 telah ditetapkan tujuan dan sasaran dalam periode 5 tahun dan direalisasikan dalam bentuk program kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud.

Tabel 1.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kepala Bidang Sumber Daya Air

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 16.368.492.820	APBD
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 6.325.001.800	APBD
Jumlah		Rp. 22.693.494.600	

Sumber : Bidang SDA Dinas PUPR Kota Pekanbaru 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sebagai yang diberi wewenang untuk mengatasi persoalan banjir telah merencanakan program yang menjadi target yang harus dicapai. Program yang dicanangkan oleh Bidang Sumber Daya Air berupa program yang bertujuan untuk mengurangi titik banjir yang ada di Kota Pekanbaru sehingga banjir tidak kembali terjadi. Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru membuat 2 program untuk mengatasi persoalan banjir di Kota Pekanbaru yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.

Dalam Pelaksanaannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2022 telah mendata di Kota Pekanbaru memiliki sebanyak 363 titik banjir yang tersebar di seluruh Kota Pekanbaru. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melaksanakan program dengan membenahi saluran drainase yang bermasalah ataupun mengalami kerusakan, membangun saluran drainase ataupun *leoning* saluran

baru serta melakukan normalisasi sungai.

Salah dua langkah yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mencegah banjir terjadi kembali ialah dengan memasang *box culvert*. Salah satu titik banjir yang dipasang *box culvert* berada di Jalan Gulama, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan di sekitar Jalan Baung. Mengutip dari Pekanbaru.go.id, dalam rangka melakukan normalisasi drainase untuk mencegah terjadinya banjir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melakukan pemasangan *box culvert* di Jalan Gulama, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan di sekitar Jalan Baung. Selain melakukan pemasangan *box culvert*, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru juga telah melakukan pembersihan sampah dan tanaman liar yang tumbuh menutupi drainase di Jalan Gulama dan Jalan Baung agar saluran drainase dapat kembali lancar serta mencegah terjadinya genangan air (Pekanbaru.go.id, 2022).

Pemasangan *box culvert* menjadi ini salah satu solusi yang

digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk mengatasi persoalan banjir. *Box culvert* ini digunakan untuk membenahi saluran drainase yang sebelumnya mengalami permasalahan. Dengan pemasangan *box culvert* ini titik banjir yang sering terjadi di wilayah tersebut dapat diatasi seiring dengan kembali optimalnya fungsi drainase dalam mengaliri air.

Gambar 1.3

Pemasangan *box culvert* di Jalan Gulama, Kecamatan Marpoyan Damai



Sumber : Pekanbaru.go.id (2022)

Selain drainase, langkah yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mencegah banjir pada tahun 2022 ialah dengan melakukan normalisasi Sungai. Di tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan normalisasi di beberapa sungai.

Dikutip dari Pekanbaru.go.id, pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru mengalokasikan dana sebesar Rp. 13 Miliar untuk melakukan normalisasi pada 3 aliran sungai. Aliran sungai yang dimaksud untuk dilakukan normalisasi ialah Sungai Sail, Sungai Sibam dan Sungai Air Hitam. Kegiatan normalisasi sungai ini telah mulai

dilaksanakan dari awal tahun 2022 (Pekanbaru.go.id, 2022).

Jika dilihat dari besarnya dana yang dianggarkan tentu semestinya proses normalisasi sungai-sungai yang dimaksud bisa dikerjakan secara maksimal. Mengingat di sekitar aliran sungai menjadi salah satu titik banjir yang sering dialami oleh Kota Pekanbaru. Bisa dikatakan kondisi aliran sungai yang ada di Kota Pekanbaru sangat jarang diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini mengakibatkan kondisi sungai menjadi tidak terawat, ditambah dengan kebiasaan masyarakat yang masih banyak membuang sampah ke sungai mengakibatkan aliran sungai menjadi terganggu sehingga disaat hujan melanda Kota Pekanbaru banjir pun tidak dapat dihindarkan.

Mengutip dari Riau1.com, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Balai Wilayah Sungai Sumatra III melakukan penandatanganan kerja sama pada 18 Maret 2022 di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru di Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya (Riau1.com, 2022). Kerja sama ini dilakukan karena perlu adanya tindakan cepat yang harus dilakukan mengingat pemukiman yang berada di sekitar aliran sungai sering kali mengalami banjir akibat meluapnya air dari aliran sungai. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan proses normalisasi dapat berjalan dengan lebih cepat sehingga banjir yang sering terjadi di sekitar wilayah aliran sungai tidak terjadi kembali.

Kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru ini menjadi sebuah langkah baik untuk

dilakukan. Mengingat bagaimana kemampuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sendiri yang masih terbatas dan juga terdapat wilayah sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dalam hal ini masuk wilayah kerja Balai Wilayah Sungai Sumatra III. Tentunya dengan kerja sama ini proses normalisasi yang dilakukan bisa lebih maksimal sehingga aliran sungai bisa secepatnya kembali normal dan banjir di sekitar aliran sungai yang ada di Kota Pekanbaru dapat dicegah.

Gambar 1.4

Normalisasi Sungai Sail



Sumber : Riauin.com (2022)

Selain ketiga sungai yang disebutkan sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru juga melakukan normalisasi di beberapa aliran sungai lainnya seperti Sungai Batak dan Sungai Sago. Banyak aliran sungai yang ada di Kota Pekanbaru selalu meluap disaat hujan dikarenakan aliran sungai yang ada tidak mampu menampung debit air yang ada. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melakukan normalisasi aliran sungai dengan melakukan pengerukan sungai sehingga sedimen dan penumpukan yang ada di dasar sungai dapat dikeluarkan. Serta Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Pekanbaru juga melakukan pembersihan sampah dan tanaman liar yang ada di sekitar badan sungai sehingga aliran sungai dapat kembali lancar.

Dari program pengelolaan drainase dan normalisasi sungai yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dapat dikatakan sudah memberikan hasil yang baik. Dengan berjalannya proses perbaikan dan perawatan drainase yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru membuat genangan banjir yang ada dapat dikurangi. Selain itu, proses normalisasi sungai yang sudah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru juga memberikan dampak yang baik. Dengan berjalannya proses normalisasi sungai ini membuat aliran sungai yang ada dapat kembali berfungsi dengan baik, sehingga aliran sungai tidak meluap kembali. Namun meskipun saluran drainase dan aliran sungai yang ada telah berfungsi dengan baik, tetap perlu adanya perawatan secara berkala yang dilakukan sehingga apa yang menjadi kendala selama ini tidak terulang lagi dan banjir dapat dicegah.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan menjadi indikator yang digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penilaian yang penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Namun belakangan ini banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai pelayanan yang diberikan organisasi

publik dalam hal ini pemerintah yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima.

Dalam rangka pencegahan banjir kembali terjadi di Kota Pekanbaru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melakukan normalisasi pada saluran drainase yang mengalami permasalahan. Maka dari itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru mengerahkan Pasukan Kuning untuk melakukan proses normalisasi drainase yang mengalami permasalahan seperti penyumbatan akibat sampah.

Gambar 1.5

Normalisasi drainase di Simpang Pasar Pagi Arengka



Sumber : Pekanbaru.go.id (2022)

Mengutip dari RiauPos.co banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait kondisi drainase yang ada tidak berfungsi sehingga disaat hujan mengguyur Kota Pekanbaru banjir pun tidak terhindarkan (RiauPos.co, 2022). Akibat banjir ini banyak masyarakat yang mengalami kesulitan saat berkendara terutama di jam sibuk seperti pagi hari. Akibat banjir yang menggenang mengakibatkan kemacetan yang parah sehingga para pengendara menjadi terlambat sampai ke tujuan mereka.

Masalah banjir yang sering terjadi di Kota Pekanbaru diakibatkan oleh kondisi saluran drainase yang ada kurang diperhatikan. Di beberapa titik banjir yang ada sering kali saluran drainase ini kondisinya tersumbat oleh tumpukan sampah. Dengan adanya tumpukan sampah yang lambat dibersihkan ini mengakibatkan saluran drainase menjadi terhambat.

Terkait permasalahan ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru telah membuat program normalisasi drainase dan normalisasi aliran sungai. Program yang dilaksanakan ini direspons oleh masyarakat dengan cukup baik dan merasa bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam hal pencegahan banjir sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Namun masih terdapat keluhan karena proses pengerjaannya masih lambat dilaksanakan. Hal ini bisa dinilai sebagai bentuk lambatnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru bergerak sebagai bentuk upaya antisipasi banjir. Karena lambatnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru bergerak sampah terus menumpuk, terkadang dibarengi dengan kondisi drainase yang juga semakin memburuk karena kurangnya perhatian terhadap kondisi drainase yang sudah seharusnya dilakukan perbaikan, akibatnya disaat hujan mengguyur Kota Pekanbaru drainase tidak dapat berfungsi secara optimal dan air dari saluran drainase tersebut meluap ke permukaan sehingga banjir pun terjadi.

Dilihat dari kondisi lapangan yang ada, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menyadari bahwa memang banyak kondisi drainase di Kota Pekanbaru yang kondisinya tidak berfungsi, baik itu karena penyumbatan ataupun mengalami kerusakan. Maka dari itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melalui Bidang Sumber Daya Air menggesa perbaikan drainase yang mengalami kerusakan dan melakukan perawatan rutin pada infrastruktur yang bermasalah sehingga mengakibatkan banjir. Mulai dari pendataan drainase yang bermasalah dan mengakibatkan banjir di Kota Pekanbaru sampai melakukan perawatan infrastruktur bersama Pasukan Kuning Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dan melakukan perbaikan infrastruktur yang dirasa memang perlu diperbaiki agar drainase yang bermasalah dapat kembali berfungsi dengan baik sehingga banjir tidak kembali terjadi.

Jika dilihat, kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terkait mencegah banjir kembali terjadi bisa dikatakan cukup baik. Normalisasi sungai yang dilakukan untuk menghilangkan sedimentasi berhasil membuat aliran sungai kembali normal sehingga air tidak meluap disaat hujan. Demikian juga dengan normalisasi drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru juga memberikan dampak yang positif. Dengan adanya normalisasi drainase ini, aliran air dapat normal sehingga drainase dapat berfungsi dengan baik kembali.

Namun sayangnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru masih terkendala jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu lama, kondisi ini sering kali membuat saluran drainase menjadi meluap karena banyaknya volume air yang lewat. Tentu ini menjadi catatan agar kedepannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dapat lebih berinovasi ataupun mencari solusi yang lebih baik sehingga meskipun Kota Pekanbaru diguyur hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu lama, drainase yang ada dapat menampung volume air yang ada dan genangan banjir yang muncul juga tidak berlangsung lama.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Singkatnya, responsivitas disini merujuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan kebutuhan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan pemegang kekuasaan dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melakukan perbaikan di beberapa drainase yang

mengalami kerusakan ataupun kurang berfungsi dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat sering mengeluhkan terkait lambatnya pengerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Dalam rangka pencegahan banjir di Kota Pekanbaru, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru telah memiliki perencanaan yang akan digunakan untuk melakukan program-programnya. Dalam pelaksanaannya pemerintah Kota Pekanbaru secara terbuka menerima keluhan maupun aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah.

Gambar 1.6

Banjir di Jalan Cempaka, Kecamatan Sukajadi akibat Proyek IPAL



Sumber : Cakaplah.com (2022)

Sepanjang tahun 2022, salah satu keluhan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat terkait banjir di Kota Pekanbaru ialah yang disebabkan oleh pembangunan proyek IPAL. Mengutip dari Pekanbaru.go.id, pemerintah Kota Pekanbaru menyebutkan pembangunan IPAL ini menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Pemerintah Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa drainase yang sebelumnya sudah dilakukan perbaikan dan dapat berfungsi sehingga banjir tidak terjadi menjadi

rusak kembali dan mengakibatkan air kembali menggenang. Maka dari itu, pemerintah Kota Pekanbaru meminta agar kontraktor pembangunan IPAL dapat sesegera mungkin menyelesaikan pengerjaan proyek tersebut (Pekanbaru.go.id, 2022).

Kondisi ini seharusnya sudah bisa diantisipasi sedari awal. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru semestinya sudah memiliki perencanaan dan langkah antisipasi dalam pelaksanaan pembangunan proyek IPAL ini. Namun kenyataannya saat pembangunan proyek IPAL ini dilaksanakan malah menimbulkan banjir dikarenakan proses pelaksanaannya yang tidak memperhatikan kondisi di lapangan. Banyak drainase yang awalnya berfungsi dengan baik menjadi tidak berfungsi karena pengerjaan proyek IPAL ini.

Berdasarkan kondisi yang ada, bisa dikatakan responsivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru masih kurang baik. Perawatan dan perbaikan drainase yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru seharusnya bisa lebih dikontrol pelaksanaannya. Proyek IPAL yang dikerjakan juga seharusnya bisa digarap dengan lebih matang lagi. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Melihat kondisi di lapangan, bisa disimpulkan bahwa responsivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam menanggapi keluhan masyarakat masih jauh dari kata baik. Proyek IPAL yang sering dikeluhkan masyarakat karena

mengakibatkan banjir sangat lambat ditanggapi oleh pemerintah. Tentu ini menjadi catatan seharusnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru bisa lebih baik dalam merespons keluhan masyarakat terkait proyek pemerintah yang sedang digarap.

Selain itu juga perencanaan pelaksanaan proyek pemerintah ini mesti dilaksanakan dengan sangat matang, termasuk juga membuat bagaimana langkah antisipasi dalam proses pelaksanaannya. Dengan demikian, meskipun Proyek IPAL ini menimbulkan genangan banjir yang dikeluhkan masyarakat, pemerintah sudah punya langkah-langkah yang akan dirempuh untuk setidaknya meminimalisir dampak yang dirasakan masyarakat.

4. **Responsibilitas**

Responsibilitas merupakan penjelasan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

Dalam rangka pencegahan banjir yang masih sering terjadi di Kota Pekanbaru maka kondisi drainase menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Drainase yang kondisinya kurang baik atau bahkan tidak baik sama sekali perlu diperhatikan agar dapat segera dilakukan perbaikan. Selain itu juga kapasitas drainase yang ada harus dipastikan dapat menampung jumlah debit air yang ada. Mengingat jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi

maka drainase yang kapasitasnya kurang memadai ditambah kondisi yang tidak baik dapat menimbulkan banjir nantinya.

Menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sendiri, bahwa drainase yang ada kapasitasnya sudah memadai untuk menampung air yang ada. Namun drainase yang ada tersebut masih sering mengalami kendala dikarenakan kondisinya yang tidak baik dan terdapat penumpukan didalamnya, baik penumpukan tanah akibat sedimentasi maupun penumpukan sampah.

Gambar 1.7

Tumpukan sampah di drainase



Sumber : Pekanbaru.gi.id (2022)

Dikutip dari Pekanbaru.go.id, masalah sampah yang menumpuk di dalam drainase masih menjadi salah satu penyebab utama drainase tidak dapat berfungsi. Saluran drainase yang telah dibersihkan sebagian besar banyak yang dipenuhi tumpukan sampah yang tersangkut sehingga menyumbat aliran drainase tersebut (Pekanbaru.go.id, 2022).

Masalah sampah di Kota Pekanbaru masih menjadi tantangan tersendiri. Sampah juga sering kali menjadi awal mula munculnya genangan banjir karena menyumbat saluran drainase yang ada. Kondisi drainase yang terdapat sampah ini membuat aliran drainase yang ada

menjadi terganggu. Dalam menghadapi tantangan ini seharusnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sudah mempersiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan sehingga permasalahan ini tidak kembali terjadi.

Tumpukan sampah masih menjadi persoalan yang masih belum terselesaikan. Akibat sampah ini pula sering kali drainase yang ada menjadi tersumbat dan mengakibatkan terjadinya banjir. Tentu ini menjadi tugas bersama antara pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru agar dapat terus memastikan bahwa semua infrastruktur drainase yang ada dalam kondisi baik dan masyarakat juga wajib ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke aliran sungai maupun ke dalam drainase. Selain tumpukan sampah, drainase yang ada di Kota Pekanbaru juga banyak yang belum terhubung satu sama lain. Kondisi ini mengakibatkan aliran air yang ada di drainase tersebut mengalir tanpa arah tidak sampai ke muaranya di sungai dan akhirnya akan menimbulkan genangan banjir.

Terkait konektivitas drainase sendiri pada tahun 2022 belum ada perencanaan ataupun pengerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Mengingat pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru yang cukup tinggi menyebabkan semakin berkurangnya daerah resapan air, sehingga keberadaan drainase yang baik dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya menjadi sesuatu yang wajib untuk di prioritaskan. Tentu ini menjadi

sesuatu yang sangat disayangkan karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tidak memprioritaskan untuk menghubungkan saluran drainase yang ada mengingat pentingnya saluran drainase ini harus terkoneksi satu sama lain agar aliran air yang ada dapat mengalir dengan baik dan tidak terjadi penumpukan yang dapat mengakibatkan banjir.

Jika dilihat, bisa dikatakan bahwa resposibilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru masih belum baik. Kondisi drainase yang mengalami pendangkalan ataupun yang mengalami penyumbatan masih sering dijumpai. Namun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sendiri masih lambat dalam mengatasinya. Tentu sangat disayangkan karena kondisi drainase yang mengalami pendangkalan ini maupun yang mengalami penyumbatan bisa menimbulkan banjir terutama disaat hujan mengguyur. Sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk terus memastikan kondisi drainase yang ada dalam kondisi yang baik sehingga banjir di Kota Pekanbaru dapat dicegah.

Selain kondisi drainase masih banyak yang dalam kondisi tidak baik, drainase di Kota Pekanbaru juga masih banyak yang belum terhubung secara keseluruhan juga menjadi hal yang sangat disayangkan. Kondisi drainase yang tidak terhubung dari satu wilayah dengan wilayah yang lainnya membuat fungsi drainase untuk menjadi saluran air yang mengalir menjadi tidak maksimal. Akibatnya drainase yang tidak terhubung ini

membuat aliran air yang ada mengalir tanpa arah dan terjadinya penumpukan air di satu titik sehingga menyebabkan banjir pada wilayah tersebut. Sayangnya hal ini tidak menjadi salah satu fokus pembenahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru di tahun 2022 mengingat ada banyak drainase yang belum terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

5. Akuntabilitas

Dalam penilaian kinerja, konsep dasar akuntabilitas dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan yang dilakukan organisasi publik itu konsisten dan selaras dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penilaian kinerja terhadap instansi pemerintahan diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam Peraturan Presiden ini menyebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para

pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru merancang 2 program dalam rangka mencegah bencana banjir yang masih sering melanda Kota Pekanbaru. Program tersebut ialah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air. Dari program-program ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menjadikan pengelolaan drainase dan normalisasi sungai menjadi kegiatan yang digencarkan. Sepanjang tahun 2022 berbagai drainase yang tersebar di seluruh Kota Pekanbaru yang sering menjadi titik banjir yang muncul dilakukan perbaikan ataupun pembersihan dari sedimentasi ataupun penumpukan sampah, serta proses normalisasi beberapa aliran sungai juga dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terutama aliran sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.

Gambar 1.8
Realisasi Penggunaan Anggaran
Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	6.654.278.781,00	6.281.955.164,00	372.323.617,00
1	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.654.278.781,00	6.281.955.164,00	372.323.617,00
1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	6.654.278.781,00	6.281.955.164,00	372.323.617,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.113.197.885,00	15.379.865.058,00	2.733.332.827,00
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.113.197.885,00	15.379.865.058,00	2.733.332.827,00
1	Pemertanian Rumput Ternak dan Dekaman Lapangan Hidup Untuk Kamitruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.319.730.900,00	1.291.728.138,00	28.002.762,00
2	Normalisasi Rumput Sungai	11.876.280.615,00	10.308.238.400,00	1.570.042.215,00
3	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	4.917.166.370,00	3.781.898.520,00	1.135.267.850,00

Sumber : LKJIP Dinas PUPR Kota Pekanbaru 2022

Tabel diatas menunjukkan bagaimana realisasi penggunaan anggaran yang telah dicanangkan untuk digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tahun 2022 untuk pelaksanaan program yang berkaitan dengan pencegahan dan mengatasi masalah banjir di Kota Pekanbaru. Dari tabel diatas dapat

diketahui bahwa untuk melaksanakan program yang berkaitan dengan pencegahan banjir ditahun 2022 pemerintah Kota Pekanbaru menganggarkan dana sejumlah Rp. 24.767.476.666,00. Jumlah ini mengalami peningkatan dari yang awalnya dianggarkan hanya sebesar Rp. 22.693.494.600.

Dengan besaran anggaran diatas dapat dilihat bahwa program kerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terkhusus untuk menangani dan mencegah terjadinya banjir bisa dikatakan cukup besar. Namun pada praktiknya masih bisa ditemukan berbagai macam keluhan masyarakat yang kembali muncul akibat dari program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru itu sendiri seperti lambatnya pengerjaan proyek yang sedang dikerjakan, material yang digunakan dalam pengerjaannya menyumbat drainase yang ada sehingga menimbulkan genangan banjir yang baru. Selain itu juga lambatnya respons pemerintah Kota Pekanbaru yang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terhadap keluhan masyarakat terkait kondisi drainase yang rusak juga masih menjadi catatan yang kurang baik.

Tabel 1.3
Perbandingan Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota	Rasio Panjang Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	72%	72,9%	100,12
		Cakupan akses Air Bersih	8%	7,7%	96,25
		Cakupan Pelayanan Air Limbah	0 SR	0 SR	-
		Persentase Titik Banjir Terselesaikan	40%	37,7%	94.25
Rata-rata Capaian Kinerja					96,88%

Sumber : LKJIP Dinas PUPR Kota Pekanbaru Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi penyelesaian titik banjir di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 tidak mencapai target. Berdasarkan informasi yang dimuat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tahun 2022, titik banjir atau titik masalah genangan di Kota Pekanbaru yang telah diselesaikan sampai dengan tahun 2022 ialah sebanyak 133 titik masalah genangan yang tertangani dari total titik banjir di Kota Pekanbaru sebanyak 363 titik masalah, dengan capaian sebesar 37.7 %, berbanding dengan target rencana sebesar 40%, tidak tercapainya target dikarenakan adanya titik genangan baru akibat curah hujan yang cukup tinggi.

Penurunan target kinerja ini dilakukan karena terdapat penyesuaian akibat dari pandemi Covid-19 yang melanda. Sehingga harus dilakukan penyesuaian target

yang ingin dicapai pada tahun 2022 menyesuaikan dengan bergesernya titik fokus pemerintah untuk melakukan pemulihan di Kota Pekanbaru pasca pandemi. Untuk tahun 2022 sendiri terdapat penyesuaian persentase target titik banjir yang terselesaikan yang awalnya diangka 45% diturunkan menjadi 40%.

Namun meskipun target penyelesaian titik banjir tersebut sudah diturunkan, nyatanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru masih tidak berhasil mencapai target. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang sangat disayangkan karena yang menjadi alasan tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan disebabkan oleh faktor alam yaitu hujan yang tinggi. Padahal sudah seharusnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru memiliki langkah antisipasi yang baik karena hujan akan terus terjadi

sepanjang waktu, terutama di musim hujan. Ini menjadi catatan untuk kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk kedepannya dapat lebih inovatif dalam melakukan perencanaan program sehingga faktor alam seperti hujan tidak menjadi alasan tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Kemudian, masih ada masyarakat yang menilai bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam menangani masalah banjir masih terbelang lamban. Hal ini tentu tidak sejalan dengan kewajiban pemerintah yang semestinya tanggap terhadap aspirasi masyarakat, salah satunya terkait persoalan banjir. Seharusnya pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru bisa lebih tanggap terhadap keluhan yang disampaikan masyarakat karena sudah menjadi tugas dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melakukan perencanaan yang matang, melaksanakan program dengan maksimal sehingga aspirasi masyarakat dapat terpenuhi dan gangguan soal banjir yang dikeluhkan masyarakat dapat diatasi.

Kondisi ini menjadi gambaran bagaimana akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam melaksanakan fungsinya sebagai yang berwenang dalam hal pembangunan dan penataan kota masih belum memenuhi aspirasi masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru semestinya sudah mempunyai langkah antisipasi yang baik dalam

perencanaan dan penggarapan programnya.

Selain itu, percepatan pelaksanaan program yang dirancang untuk mengatasi banjir dan mencegah banjir tidak kembali terjadi harus terus dilakukan. Mengingat bagaimana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sendiri yang terkesan lambat dalam melakukan penanganan banjir yang ada. Ditambah lagi dengan besarnya jumlah anggaran yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan program pencegahan banjir ini mempunyai angka yang cukup besar. Tentu dengan jumlah anggaran yang besar ini masyarakat mengharapkan agar anggaran besar yang digunakan ini benar-benar bisa mencegah banjir terjadi di Kota Pekanbaru. Namun realitasnya masih dapat dengan mudah banjir ditemukan di Kota Pekanbaru. Tentu ini tidak sejalan dengan apa yang diinginkan masyarakat.

Dengan anggaran yang cukup besar ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru harus bisa memanfaatkannya dengan sebaik dan semaksimalnya, karena bagaimanapun juga sumber dana dari anggaran yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru berasal dari masyarakat, tentu masyarakat ingin uang yang diberikan kepada pemerintah digunakan dengan sebaik dan semaksimalnya untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dan mengatasi apa yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat, yaitu soal banjir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan untuk mendeskripsikan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mencegah banjir di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari indikator produktivitas, program pengelolaan drainase dan normalisasi sungai yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dapat dikatakan sudah memberikan hasil yang baik. Dengan berjalannya proses perbaikan dan perawatan drainase yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru berhasil membuat genangan banjir yang ada dapat dikurangi. Selain itu, proses normalisasi sungai yang sudah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru juga memberikan dampak yang baik. Dengan berjalannya proses normalisasi sungai ini membuat aliran sungai yang ada dapat kembali berfungsi dengan baik, pendangkalan sungai yang telah diatasi juga membuat aliran sungai ini tidak meluap kembali.
2. Dari indikator kualitas layanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru telah memberikan kualitas layanan yang bisa dikatakan cukup baik dalam hal mencegah banjir kembali terjadi. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru telah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat kota Pekanbaru. Namun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru masih terkendala jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu lama, kondisi ini sering kali membuat saluran drainase menjadi meluap karena banyaknya volume air yang lewat.
3. Dari indikator responsivitas, bisa dikatakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru masih kurang baik. Perawatan dan perbaikan drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru seharusnya bisa lebih dikontrol pelaksanaannya. Sebab kondisi drainase yang ada sering kali dikeluhkan oleh masyarakat karena mudah menimbulkan banjir akibat drainase yang mengalami pendangkalan ataupun mengalami penyumbatan. Selain itu, Proyek IPAL yang dikerjakan juga seharusnya bisa digarap dengan lebih matang lagi. Proyek IPAL yang sering dikeluhkan masyarakat karena mengakibatkan banjir sangat lambat ditanggapi oleh pemerintah. Dengan kondisi ini, ditambah keluhan masyarakat yang sering mengeluhkan pelaksanaan Proyek IPAL ini menimbulkan banjir tentu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru harus lebih bisa mengantisipasi hal tersebut sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat.

4. Dari indikator responsibilitas, bisa dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru masih belum baik. Kondisi drainase yang mengalami pendangkalan ataupun yang mengalami penyumbatan masih sering dijumpai. Namun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sendiri masih lambat dalam mengatasinya. Tentu sangat disayangkan karena kondisi drainase yang mengalami pendangkalan ini maupun yang mengalami penyumbatan bisa menimbulkan banjir terutama disaat hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu lama mengguyur Kota Pekanbaru. Selain itu juga kondisi drainase yang belum terhubung secara keseluruhan juga menjadi hal yang disayangkan. Kondisi drainase yang tidak terhubung dari satu wilayah dengan wilayah yang lainnya membuat fungsi drainase untuk menjadi saluran air yang mengalir menjadi tidak maksimal. Akibatnya drainase yang tidak terhubung ini membuat aliran air yang ada mengalir tanpa arah dan terjadinya penumpukan air di satu titik sehingga menyebabkan banjir pada wilayah tersebut. Sayangnya hal ini tidak menjadi salah satu fokus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru di tahun 2022 mengingat ada banyak drainase yang belum saling terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Maka dari itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sebagai instansi yang memiliki tugas dan kewenangan terkait hal ini harus lebih bijak lagi dalam menentukan program yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh masyarakat.
5. Dari indikator akuntabilitas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai yang berwenang dalam hal pembangunan dan penataan kota masih belum memenuhi dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru semestinya sudah mempunyai langkah antisipasi yang baik dalam perencanaan dan penggarapan programnya. Selain itu, percepatan pelaksanaan program yang dirancang untuk mengatasi banjir dan mencegah banjir tidak kembali terjadi harus terus dilakukan. Mengingat bagaimana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sendiri yang terkesan lambat dalam melakukan penanganan banjir yang ada. Ditambah lagi dengan besarnya jumlah anggaran yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan program pencegahan banjir ini mempunyai angka yang cukup besar. Tentu dengan jumlah anggaran yang besar ini masyarakat mengharapkan agar anggaran besar yang digunakan tersebut benar-benar bisa mencegah banjir terjadi di Kota Pekanbaru. Namun realitasnya

masih dapat dengan mudah banjir ditemukan di Kota Pekanbaru. Tentu ini tidak sejalan dengan apa yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran yang cukup besar ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru harus bisa memanfaatkannya dengan sebaik dan semaksimalnya, karena bagaimanapun juga sumber dana dari anggaran yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru berasal dari masyarakat, tentu masyarakat ingin uang yang diberikan kepada pemerintah digunakan dengan sebaik dan semaksimalnya untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dan mengatasi apa yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat, yaitu banjir.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan kesimpulan yang telah dipaparkan untuk mendeskripsikan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mencegah banjir di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 maka saran yang dapat diberikan ialah perlu adanya pengecekan dan perawatan secara berkala yang dilakukan terhadap drainase dan aliran sungai yang ada sehingga kondisi drainase dan aliran sungai yang ada dapat terpantau dengan baik dan proses perawatan maupun normalisasi dapat dengan cepat dilakukan sehingga banjir bisa diantisipasi.

Selain itu juga kedepannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

agar dapat lebih responsif dengan keluhan ataupun aspirasi masyarakat yang diberikan. Mengingat pada dasarnya instansi pemerintahan di Indonesia mesti bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai yang memberikan amanah dalam menjalankan roda pemerintahan. Demikian juga untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang mesti mendengarkan dan lebih tanggap dengan masyarakat. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memberikan pertanggung jawaban yang baik juga kepada masyarakat.

Selanjutnya perlu adanya inovasi dan solusi yang benar-benar solutif dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terkait banjir ini. Mengingat sepanjang tahun kota Pekanbaru kerap mengalami hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu lama. Dengan demikian walaupun kota Pekanbaru diguyur hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu lama banjir dapat diantisipasi agar tidak terjadi.

Untuk kedepannya diharapkan perencanaan pelaksanaan proyek pemerintah mesti dilaksanakan dengan sangat matang, termasuk juga membuat bagaimana langkah antisipasi dalam proses pelaksanaannya. Seperti contohnya dalam pengerjaan Proyek IPAL. Meskipun tujuan dari dibangunnya proyek ini untuk masyarakat juga namun tak bisa dipungkiri jika proyek ini juga menimbulkan genangan banjir yang dikeluhkan masyarakat. Pemerintah sudah

sepatutnya punya langkah-langkah yang akan ditempuh untuk setidaknya meminimalisir dampak yang dirasakan masyarakat. Selain itu juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sebagai pihak yang punya kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan harus lebih tegas dan ketat dalam melakukan kerja sama, hal ini dilakukan agar proyek yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang seharusnya dan meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh proyek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 tahun 2020 tentang Rencana Tata Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru 2018-2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2022

Buku

Asdak, Chay. (1995). Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Edy, Sutrisno, (2016), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Goernance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadiyanto, Tri dan Makinuddin. (2006). *Analisis Sosial. Bandung* : Yayasan Akatiga

Indra Bastian. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.

Keban, Yeremias T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gavamedia.

Kodoatie, Robert J. Dan Sugiyanto. (2002). *BANJIR – Beberapa*

- penyebab dan metode pengendaliannya dalam perspektif Lingkungan* (Cetakan Pertama). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Komaruddin. (2001). *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke 5. Jakarta. Bumi Aksara
- Marpaung, Leden. (2001). *Tindak Pidana Korupsi-Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta : Djambatan
- Rahayu. Dkk. (2009). *Banjir dan Upaya Penanggulangannya*. Bandung : Pusat Mitigasi Bencana (PMB-ITB)
- Ramli, Soehatman. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Berencana*, Dian Rakyat. Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. (2001). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES
- Stephen P. Robbins, (1996). *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Alih Bahasa: Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam. Penerbit PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Sugiyono. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Suripin. (2004). *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi.
- Jurnal**
- Eldi, E. (2020). *Analisis Penyebab Banjir di DKI Jakarta*. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(6), 1057-1064.
- Eva Susanti, N. Anggraeny, R. & Zulfiani, D. (2018). PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA. (eJournal Administrasi Negara, Volume 6, Nomor 2, 2018)
- Nasyiruddin, M. M. (2015). Strategi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir di kabupaten bantaeng. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 157-173.
- Wahda, J., & Sadad, A. (2023). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam mengelola Drainase di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 9178-9188.
- Yohana. C, Griandini. D, Muzambeq. S. (2017). *Penerapan Pembuatan Teknik Lubang Biopori Resapan Sebagai Upaya Pengendali Banjir*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM). Vol. 1, No. 2 Desember 2017
- Skripsi**
- Della Mega, A. (2018). *Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Pemerintah Kota Surabaya dalam Penanggulangan Banjir* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Fernanda, Y. (2018). *KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TERHADAP PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN DI KELURAHAN PULAU KARAM KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Hidayati, R. (2017). *Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penanggulangan Banjir dan Genangan di Kota Surakarta*. Skripsi Administrasi Publik FISIP UNS

Pratama, R. (2022) *Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Drainase di Kota Dumai Tahun 2020*. Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Website

Kota Pekanbaru Dalam Angka 2020 – Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru Dalam Angka 2021 – Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru Dalam Angka 2022 – Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

Kumparan.com. 22 Mei 2022. *Dulu Punya Kedalaman 30 Meter, Ini Sungai Terdalam di*

Indonesia

<https://kumparan.com/kumparantravel/dulu-punya-kedalaman-30-meter-ini-sungai-terdalam-di-indonesia-1y7ZW75qWr9/1>

(Diakses pada 29 Desember 2022)

_____. 28 April 2022. *PUPR Pekanbaru Sebut Sampah Menyumbat Drainase Sebabkan Banjir*. <https://www.pekanbaru.go.id/index.php/p/news/pupr-pekanbaru-sebut-sampah-menyumbat-drainase-sebabkan-banjir> (Diakses pada 3 Februari 2023)

_____. 3 Juni 2022. *Normalisasi 3 Sungai, Dinas Anggarkan 13 Miliar*. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/normalisasi-3-sungai-dinas-pupr-anggarkan-rp13-miliar> (Diakses pada 3 Januari 2023)

_____. 6 Agustus 2022. *PUPR Pekanbaru Pasang Box Culvert di Jalan Gulama*. <https://www.pekanbaru.go.id/index.php/p/news/pupr-pekanbaru-pasang-box-culvert-di-jalan-gulama> (Diakses pada 3 Januari 2023)

_____. 24 Agustus 2022. *Jadi Penyebab Banjir, PJ Walikota Desak Kontraktor Selesaikan Proyek IPAL*. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/jadi-penyebab-banjir-pj-wali-kota-desak-kontraktor-selesaikan-proyek-ipal> (Diakses pada 3 Februari 2023)

_____. 18 Oktober 2022. *Pemko Pekanbaru Minta Bantuan Pusat Tangani Banjir Akibat Luapan Sungai*

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-minta-bantuan-pusat-tangani-banjir-akibat-luapan-sungai>

(Diakses pada 29 Desember 2022)

_____. 31 Oktober 2022.
Dinas PUPR Pekanbaru Akui Banyak Drainase Tersumbat Karena Sampah

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/dinas-pupr-pekanbaru-akui-banyak-drainase-tersumbat-karena-sampah>

(Diakses pada 29 Desember 2022)

Riau1.com. 22 Maret 2022. Atasi Luapan Sungai Sail Dinas PUPR Pekanbaru – BWSS III Teken Perjanjian Kerja Sama. <https://www.riau1.com/berita/pekanbaru/1647966377-atasi-luapan-sungai-sail-dinas-pupr-pekanbaru-bwss-iii-teken-perjanjian-kerja-sama> (Diakses pada 27 Januari 2023)

RiauKini.com. 4 Oktober 2022. *Sungai Batak Meluap, Akses Jalan Lembah Raya Lumpuh Total*

<https://riaukini.com/news/detail/1340/sungai-batak-meluap-akses-jalan-lembah-raya-lumpuh-total> (Diakses pada 16 Juni 2023)

_____. 5 Oktober 2022.
PUPR Sebut Luapan Sungai Siak Jadi Salah Satu Penyebab Banjir di Pekanbaru

<https://riaukini.com/news/detail/1345/Pemprov> (Diakses pada 16 Juni 2023)

RiauPos.co. 19 Januari 2022. Banjir di Pekanbaru, Gara-gara Drainase Tak Berfungsi. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2253546977/banjir-di-pekanbaru-garagara-drainase-tak-berfungsi>

(Diakses pada 24 Januari 2023)

RiauPos.jawapos.com. 4 Oktober 2022. *Pasar Bawah Pekanbaru Terendam Banjir*

<https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/04/10/2022/284019/pasar-bawah-pekanbaru-terendam-banjir.html> (Diakses

pada 16 Juni 2023)